

PERANAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA MASA HINDIA-BELANDA HINGGA REFORMASI MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN IR. JOKOWI DODO

Uswatun Khasanah¹, Reka Seprina²

uswatunkhasanah7616@gmail.com¹, reka.seprina@unja.ac.id²

Pendidikan Sejarah Universitas Jambi^{1,2}

Abstrak: Pemerintah kolonial belanda masih diakui sebagai penguasaan Hindia Belanda atas wilayah Indonesia Mereka sudah pergi sebelumnya. Sejak saat itu muncul fenomena kewenangan ganda di satu wilayah diantara pemerintahan Hindia Belanda dengan Republik Indonesia. Artikel ini menjelaskan tentang masa reformasi menimbulkan sejumlah tindakan memberontak oleh rakyat yang menyebabkan sebuah wilayah menjadi kedaulatan pemerintahan Belanda. Dan Metode yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian sejarah yang terbagi menjadi empat bagian, Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan Historiografi. Peranan Kepolisian yang kondusif guna meminimalkan akibat dari serangan teroris dan permusuhan yang terjadi pada saat itu. Kepolisian pada masa Hindia-Belanda mengawasi perkembangan media cetak ini pada tahun berlangsung sangat lama hingga kemerdekaan. Perubahan penting terjadi pada isi surat kabar dari munculnya kabar sebagai instrumen yang berperan dalam komunikasi perdagangan sampai menjelma sebagai dewan yang mengangkat isu sosial dan politik.

Kata kunci : Peranan, Kepolisian Republik Indonesia, Reformasi

Abstract: *The Dutch colonial Government is still recognized as the dutch East Indies control over Indonesian territory. They have gone before. Since then, the phenomenon of dual author has emerged in one area between the Dutch East Indies Government and the Republik of Indonesia. This article explains about the revolutionary period that led to a number of acts of rebellion by the people which caused an area to become the authority of the Dutch government. And the metohod that will be used in the research is the historical researchis the historical research method which is divided into four parts, heuristik , source criticism, interpretation, and historiography. The role of the police is conducive to minimizing the consequences of terrorist attacks and hostilities that occurred at that time. The police during the Dutch East Indies Period supervised the Development of this print media in the very long years until independence. Importanat changes occurred in the content of newspapers from the emergence of news as an instrument that plays a role in instrument that plays a role in trade communion to becoming a council that raised social and political issues.*

Keywords : Roles, Indonesian Police, Reformation

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, masyarakat berkembang secara perlahan, dimana evolusi ini selalu memerlukan proses penyesuaian, terkadang terjadi di luar keseimbangan. Polisi memikul kewenangan strategis dalam perlindungan masyarakat terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba. Ditegaskan pula melalui regulasi UU nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Polri sebagai wali, pelestari serta abdi masyarakat yang berkewajiban membasi penyakit yang menjangkiti masyarakat, salah satunya terkait narkoba.

Upaya polri mengatasi kendala yang dihadapi Polri dalam penegakan hukum antinarkoba di Pemerintahan Indragiri Hulu sangat membutuhkan kerjasama para pihak. Hal ini sesuai dengan pandangan Fiyana (2017) Sebagai berikut bahwa “munculnya koordinasi dan kolaborasi dalam diri kepolisian dengan berbagai pihak terkait (tokoh masyarakat, lembaga, institusi lain) adalah salah satu terobosan nyata dalam memperbesar rasa sadar dan patuh bagi para masyarakat dalam menjaga suasana tertib dan aman sesuai regulasi yang ditetapkan”.

Menurut Agustina, (2016:12) Fungsi Kepolisian Indonesia ialah perwujudan dari fungsi pemeliharaan ketertiban dan keamanan di lingkup masyarakat oleh pemerintah. Hal itu selaras dengan kajian teoritis dan normatif sehingga peranan kepolisian adalah wujud implementasi tata kelola pemerintahan. Oleh karenanya, diperlukan pedoman nyata dalam bertindak melalui adanya asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pedoman yang ditetapkan dijadikan sebagai landasan normatif yang diterapkan meski tidak ditulis. Adapun ciri dari penyelenggaraan kepolisian yang berkualitas salah satunya melalui indikasi institusi yang bebas dari tindakan mal-administrasi.

Akan tetapi kepolisian adalah instansi yang memeriksa pada jenjang pertama yaitu penyidikan dan penyelidikan menganggap perlunya diatur secara khusus agar tata cara pemeriksaan pada rangka melindungi hak-hak tersangka bertujuan tidak dirugikannya hak asasi yang melekat di diri atau dalam artian selanjutnya bahwasanya UU No.2 Tahun 2002 khususnya berkaitan dengan perlindungan Hak Azasi Manusia merupakan *lex specialis* dari UU No.8 Tahun 1981.

Adapun yang menjadi permasalahan yaitu sejauh mana tindakan kekerasan oleh polisi itu dapat dibenarkan oleh hukum dan tidak justru melanggar hak asasi manusia. Berpedoman kepada Shutherland tersebut maka dapat dipahami bahwa kekerasan “harus” terjadi guna memberikan perlindungan kepada masyarakat tetapi untuk menghindari jangan sampai perlindungan masyarakat digunakan sebagai alat untuk melakukan kekerasan sehingga perlu adanya pembatasan yang jelas. Serta Penggunaan kekerasan terhadap masyarakat sekalipun diduga sebagai pelanggar hukum senantiasa tidak dibenarkan di dalam suatu Negara Hukum apalagi oleh aparat penegak hukum itu sendiri dalam hal ini Kepolisian. Tindakan kekerasan semacam itu bahkan oleh dunia internasional dianggap sebagai pelanggaran HAM yang berat.

Indonesia pada dasarnya ialah negara kesatuan dengan semangat pemerintahan yang demokratis. Artian secara lengkap, bahwasanya pemilih (dalam hal ini rakyat) adalah *core* dari demokrasi itu sendiri. Sehingga pilihan yang dijatuhkan terbebas dari intervensi, termasuk ketika keputusan menetapkan pemimpin (pemilu). Dimulai tahun 2004, pemilu diselenggarakan secara demokratis dan dalam artian sebenarnya sehingga melahirkan figur berkualitas yang menjadi pemimpin. Secara bertahap, pemilihan pemimpin diselenggarakan menyeluruh dari tingkatan tertinggi hingga didelegasikan ke pemerintahan rendah. Dari presiden sampai ke tingkatan desa. Diketahui pula jika pemimpin merupakan figur vital yang memegang kendali politik di berbagai tingkatan sehingga muncul beragam variasi metode dalam meraih posisi tertinggi tersebut.

Berkaitan dengan artian pemimpin sebagai figur pemegang kendali sistem pemerintah, maka perlu dikaitkan dengan latar belakang SDM yang tersedia di masyarakat. Melihat kompleksitas dari penyelenggaraan negara dan masifnya perkembangan global, maka

diperlukan figur pemimpin dengan wawasan kuat baik di pemikiran nasional sampai global, dan pemimpin yang bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah.

Doktrin “Poros maritim dunia” muncul karena Presiden Jokowi Dodo menyadari bahwa potensi laut Indonesia. Doktrin ini bertujuan untuk menjadikan laut Sebagai salah satu prioritas kebijakan. Dengan terwujudnya ajaran Indonesia sebagai porosnya Sea World, Presiden telah mencangkan agenda pembangunan yang berfokus pada lima buah pilar, yakni: Pembangunan Indonesia pada budaya bahari; Perlindungan akan laut beserta sumber daya yang terkandung serta menumbuhkan nelayan yang berdaulat sehingga mampu menjadi tiang utama; Mengutamakan pembangunan infrastruktur lewat adanya fasilitas pelabuhan, tol laut, peralatan industri kapal, logistik, dan keterhubungan sektor maritim dan perjalanan laut; Melaksanakan diplomasi maritim dan mengajukan saran perbaikan Kerjasama di sektor maritim dan usaha dalam mengatasi akar penyebab konflik; Bangun Sea power sebagai wujud tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran Kemanan di laut. (dalam Hakiki, N., & Utomo, T. C. (2019).

Mengingat sejak pemerintah daerah otonom mendeklarasikan kemerdekaannya, Pegawai negeri sering dalam kekacauan, dan keamanan diperlukan Perhatian dan Hal-hal lain harus dilakukan, maka orang akan Saya sendiri, mengangkat PNS baru melalui rapat umum. Secara general diangkat dari figur ulama atau kiai. Ulama mengubah pejabat tidak hanya di PNS, tapi di kepolisian dan kejaksaan. Perubahan ini Spontan dan simultan, biasanya damai dan Masuk akal. Pemerintah kolonial belanda masih diakui sebagai penguasaan Hindia Belanda atas wilayah Indonesia Mereka sudah pergi sebelumnya. Sejak saat itu muncul fenomena kewenangan ganda di satu wilayah diantara pemerintahan Hindia Belanda dengan Republik Indonesia. Pada akhirnya masa revolusi menimbulkan sejumlah tindakan memberontak oleh rakyat yang menyebabkan sebuah wilayah menjadi kewenangan pemerintahan Belanda.

Semenjak kekuasaan daripada Hindia Belanda, mulai merebak konflik diantara pers yang resmi dan tidak resmi (alternatif). Awalnya saat itu di massa kolonial, hanya surat kabar tawanan yang diizinkan untuk ditertibkan dari sudut pandang pemerintah. Bataviasche ialah produk surat kabar paling awal di Hindia Belanda yang sudah dikenal semenjak tahun 1744. Semenjak diterbitkannya cetakan pertama, sudah 120 tahun lamanya Baron van Imhoff, memberi tugas misi manajer pada J.E. Yordania, tenaga penjualan atasan kantor sekretaris jenderal VOC.

Terdapat prasyarat bahwa surat kabar perlu mendapat stempel dari pemerintahan kolonial. Muatan surat kabar terdiri atas iklan, serta segala bentuk berita administrasi kolonial. Regulasi atas terbitnya surat kabar diatur oleh Gubernur Daendels di medio 1809. Gubernur Jendral Daendels dikreditkan menjadi figur yang mengawali adanya peraturan untuk pencetakan dan untuk penerbitan surat kabar. Muatan dari regulasi mengandung aturan jika surat kabar hendaknya memprioritaskan kandungan iklan, pengumuman pemerintah terkait dokumen-dokumen yang sifatnya publik, serta pengumuman lain yang memiliki urgensi. Termuat juga, jika surat kabar perlu mendapat sensor yang diperlukan. Stempel dari pemerintah kolonial, dengan iklan, atau apapun yang berkorelasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kolonial.

Namun, tren ini mulai berubah sejak surat kabar memimpin pihak swasta (informal) mulai kesal dan berani mengkritik kebijakan pemerintah masa kolonial, terutama yang berkaitan dengan pertanian paksa. Gerakan ini telah menyulut semangat pers dan media alternatif pada masa kolonial. Karena, berbicara tentang konsep Aten (2002), karakteristik dari media-media alternatif ialah muatan pemikiran rakyat termarginalkan, memuat manifestasi dari masyarakat yang beragam pendapat, berisi tanggung jawab sosial, mengusulkan topik Berita tidak sering diterbitkan. Jurnalisme informal di masa kolonial dai menolak otoritas dan mencoba mengungkapkan sesuatu yang dianggap tabu oleh pemerintah.

Penerapan Kebijakan moral pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Jambi, Belanda memperkenalkan kebijakan pelengkap, irigasi dan migrasi mereka, pemerintah mulai mengenakan pendidikan Barat dengan membuka sekolah untuk masyarakat adat, sehingga muncullah pendidikan modern di Jambi, Belanda melakukan migrasi bagi masyarakat hukum adat kemudian di bidang sosial budaya westernisasi. Sistem ekonomi dan warisan kolonialisme Belanda ini dapat digunakan sebagai bahan ajar sejarah, khususnya pembelajaran sejarah, terkait pengaruh Barat dan Koloni Kerajaan terjadi di Jambi. Bahan ajar diperlukan untuk menunjang suatu kegiatan pembelajaran dan belajar. Melengkapi siswa dengan bahan ajar yang dapat meningkatkan Kemampuan untuk mengkonseptualisasikan materi adalah dasar dari proses pengajaran dan belajar.

Merujuk kandungan dari Pasal 5 khususnya di Ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 termuat kandungan bahwasanya Kepolisian dijadikan sebagai instrumen negara yang memikul peranan dalam menjaga masyarakat agar aman dan tertib, serta memastikan ketegakan hukum, menawarkan perlindungan, melayani serta mengayomi masyarakat dalam orientasi menuju terciptanya kemandirian masyarakat. Pada Ayat 5 termuat makna jika prasyarat adanya dinamika masyarakat adalah melalui ketertiban-keamanan. Adanya situasi tersebut akan mengarah pada orientasi nasional melalui upaya menjamin keamanan, ketertiban dan penegakan hukum. Sebagai perwujudan dari perdamaian, yang mampu memecah, menghentikan, dan memulihkan supremasi dari hukum serta menghindari tindak negatif yang merugikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Menurut Nugroho Notosusanto (1971) metode studi sejarah memiliki empat tahap: heuristik (pengumpulan data), kritik sumber (pemeriksaan), analisis interpretasi, dan perekaman sejarah (penulisan sejarah).

Langkah yang pertama adalah metode heuristik, yang merupakan langkah awal dalam kegiatan pengumpulan data historis primer dan sekunder. Sumber sejarah adalah bahan rekaman sejarah yang mengandung bukti (evidence) yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut. Studi literature dilakukan untuk mengumpulkan bahan pembantu untuk memecahkan masalah penelitian. Langkah pertama adalah mengumpulkan sumber-sumber primer yang relevan dengan topik penelitian yang ada. Selanjutnya,

Sumber kedua. Menurut Louis Gottschalk, sumber sekunder adalah kesaksian dari siapa saja yang bukan saksi. Sumber daya ini berisi materi asli yang telah diteliti sebelumnya. Temukan buku, tesis, dan jurnal yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku dengan topik penelitian.

Tahap kedua dari kritik sumber adalah kegiatan menyaring sumber-sumber sejarah yang diterima. Proses kegiatan kritis melewati dua tahap. Tahap pertama adalah kritik eksternal, yaitu pengolahan atau pemilihan data (fisik) yang terlihat secara eksternal dalam kaitannya dengan sumber-sumber sejarah yang diperoleh. Semua karakteristik sumber sejarah yang diterima harus bernuansa terkait dengan materi pelajaran yang relevan, tahap yang kedua yang disebut kritik internal, adalah proses pemilihan inti dari data historis yang telah lulus kritik eksternal. Langkah selanjutnya adalah memilih sumber sejarah yang sesuai dengan bahan penelitian.

Tahap ketiga berikutnya adalah tahap analisis atau interpretasi, yaitu interpretasi data yang telah diverifikasi, dilanjutkan dengan menghubungkan fakta-fakta dalam bentuk konsep-konsep yang disusun berdasarkan analisis sumber-sumber sejarah. Diperoleh, pada tahap ini, penulis menggabungkan sumber subjek dan sub topik untuk mengumpulkan lebih banyak dari studi literatur. Untuk analisisnya, penelitian ini menggunakan topik yang berkaitan dengan Peranan Kepolisian Republik Indonesia Pada Masa Hindia-Belanda Hingga Reformasi Masa Pemerintahan Presiden Ir. Jokowi Dodo.

Tahap keempat adalah historiografi sejarah adalah proses menyusun dan menggabungkan semua temuan penelitian sebagai laporan tertulis atau penelitian tentang topik yang diangkat. Sejarawan menulis sejarah sebagai sarana mengkomunikasikan temuan penelitian untuk diungkapkan. Diperiksa (diverifikasikan), dan ditafsirkan kemudian dicatat secara sistematis dan kronologis secara tertulis. Dalam kajian ini, penulis mengungkapkan Peranan Kepolisian Republik Indonesia Pada Masa Hindia-Belanda Hingga Reformasi Masa Pemerintahan Presiden Ir. Jokowi Dodo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang didapatkan adalah terkait dengan bentuk wewenang yang dijalankan secara absolut oleh peradilan agama ditinjau dari dinamika pasca reformasi dan diawali semenjak era kolonial Hindia-Belanda. Pemerintah Belanda dengan jelas menetapkan Pengadilan Agama berdasarkan Saatsblad pada tahun 1882 152 yang memuat bahasan terkait Peradilan Agama yang dibentuk di daerah Jawa dan Madura. Tercantum wewenang daripada pengadilan agama yang mengatur sejumlah aspek namun terbatas pada proses peribadatan seperti Puasa, sholat dan bendungan Zakat. Hukum Muamara mengatur sebatas urusan perkawinan, Perceraian, rekonsiliasi, dan lain-lain (Wahyudi, 2016).

Perkembangan Media Massa Di Indonesia

Indonesia mempunyai sejarah yang bisa diklasifikasikan menurut periodisasi sebagai berikut:

- a. Era Kolonialisme oleh Belanda
- b. Era Jepang menduduki Indonesia
- c. Era kemerdekaan awal sampai Orde Lama

- d. Era Orde Baru berkuasa
- e. Era kelahiran Reformasi sampai saat sekarang

Durkheim (dalam Nasrullah, 2017; 7) istilah sosial diejawantahkan melalui makna realitas sosial atau melalui istilah *the sosial as sosial fact*. Artinya tindakan masyarakat yang dilakukan memberikan kontribusi langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Proses sosial dijadikan sebagai produk yang memuat makna kedua definisi tersebut. Adapun pemikiran Marx (Nasrullah, 2017: 7) menjelaskan jika proses kerja sama antar individu itulah yang dijadikan sebagai makna sosial. Adanya muatan jika istilah “sosial” diterjemahkan melalui tindakan konkrit individu dalam proses kerja bersama di segala situasi. Diumpamakan pula jika makna sosial termuat dalam mekanisme produksi dengan komponen mesing yang saling bersinergi menciptakan suatu bentuk produk nyata.

Gambar 1 Contoh beberapa aksi kepolisian melawan terorisme



me
me
global. Penyebar tuasan benda suaan dianggap sebagai sajian umum yang sewaktu-waktu dikonsumsi oleh masyarakat luas. Dalam persoalan terorisme, media cetak juga berkontribusi dalam penyebarannya baik di lingkup nasional hingga lokal.

Mayoritas penangkapan para teroris diawali oleh kemudahan pelacakan sosial media oleh pihak polisi. Namun media lain yang sifatnya publik seperti contohnya koran, televisi, radio, majalah digunakan teroris dengan alasan diartikan sebagai basis permanen, dan tidak diklasifikasikan menjadi media yang mudah dipakai portabel dan portabel.

Contohnya adalah mengambil *Glory of the Rising Sun* di *Philips Strait* Perbatasan antara Singapura dan Batam pada 7 Februari 2018. Penangkapan berhasil menyita 1 ton sabu atau jika dituangkan menjadi nominal uang sebanyak Rp. 1,5 triliun. Penangkapan ini berhasil dilakukan melalui patroli dan kerjasama antara Departemen Luar Negeri Pusat, Pusat kepabeanan dan Cukai Batam. Namun, proses perawatan mencakup lebih banyak bagian Umum memeriksa kapal ini. Disampaikan oleh Brigjen Eko Daniyanto kapal di TO (menjadi target) dalam enam bulan terakhir. Kemudian tim kolaborasi dari BNN, TNI AL dan Bea Cukai, Kemnetrian kewanman Publik telah beroperasi sejak 2 Desember 2017, terkait informasi kapal asing pengangkut narkoba ke Indonesia melalui jalur laut di perahu nelayan.

Masuknya Belanda ke wilayah Kesultanan Jambi dimulai pada tahun pemerintahan Sultan Muhammad Fachrudin pada tahun 1833, ketika Sultan meminta bantuan Belanda untuk melawan para perompak yang menguasai daerah tersebut. Bagian strategis dari wilayah Kesultanan Jambi adalah pada areal Sungai Batang Hari yang dijadikan sebagai sentral Kesultanan Jambi sekaligus pusat dari perekonomian warga Jambi saat itu. Kemudian di medio 1615 J.P Coen, seorang Gubernur Jendral dari VOC, mengutus dua buah Kapal menuju Jambi dibawah arahan kepala perwakilan perdagangan Opperkoopman Steck. Selain tujuan kunjungannya untuk membasmi bajak laut, dia juga investasi kemungkinan transaksi di Jambi. (Seprina, R. 2021).

Menurut Robert Merton, John Scott menjabarkan jika tingkah laku peran yang berkaitan terhadap pekerjaan khusus mencakup seperangkat tingkah laku yang menggantikan tingkah laku khas lain, yang dikenal dengan "agregasi peran". Caranya individu dikatakan berperilaku pada pertemuan lainnya yang mengarah pada kecenderungan yang berbeda. Sehingga arti dari peranan adalah posisi khusus sebagai acuan individu berperilaku dalam tingkatan di masyarakat.

Luaran yang dihasilkan dari riset ini menggambarkan jika peran daripada pihak kepolisian dalam penyebarluasan usaha meminimalisir *hoax* dan ujaran kebencian yang bertempat di lokasi Kelurahan Taman Asri telah menghasilkan konklusi peran yang baik, dengan presentase nilai: 53,5% penghinaan (39 orang responden diklasifikasikan di kategori berperan), 79,5% menghasut (58 orang responden juga diklasifikasikan di kategori berperan), dan 54,8% penyebaran berita bohong (40 orang responden ada berkategori cukup berperan).

Tabel 1 Kategori Kondisi Orotitas dalam konteks Sosial Politik Pra dan Pasca Internet

Media Alternatif	
Berdasarkan Kondisi Otoritas dan Konteks Sosial Politik	
Pra Internet	Pasca Internet
1. Media Diawasi Secara Ketat	Sistem Media Demokratis Partisipan
2. Media harus mempunyai lisensi	Media bisa eksis tanpa lisensi
3. Represif terhadap media tak berizin	Lunak dan bebas terhadap media
4. Belum terdapat jaringan internet	Ada jaringan internet interaktif

5. Alternative media bergerak dibawah tanah	media alternative banyak bermunculan di internet (mis. Media LGBT dan media ideology kiri)
6. media alternative digerakan oleh kaum terpelajar dan intelektual	Media laternatif bisa digerakan oleh siapa saja yang memiliki akses informasi
7. Media alternative dianggap sebagai ancaman oleh Negara	Media alternative diperbolehkan bahkan digunakan pemerintah di daerah pedalaman

KESIMPULAN

Perkembangan media dari zaman penjajahan Belanda hingga saat ini sangat penting dan beragam. Media berkembang pada masa awal penjajahan Belanda, dan media pertama, yaitu media cetak, muncul di Indonesia. Dalam pemberitaan terorisme dan perang pemerintahan kolonial lebih efektif sehingga Peranan Kepolisian yang kondusif guna meminimalkan akibat dari serangan teroris dan permusuhan yang terjadi pada saat itu. Kepolisian pada masa Hindia-Belanda mengawasi perkembangan media cetak ini pada tahun berlangsung sangat lama hingga kemerdekaan. Perubahan penting terjadi pada isi surat kabar dari munculnya kabar sebagai instrumen yang berperan dalam komunikasi perdagangan sampai menjelma sebagai dewan yang mengangkat isu sosial dan politik. Namun, selain efek positif yang terbukti, kebijakan Keterlibatan pemerintah untuk mengatasi masalah ini masih terbatas dan belum hasil yang maksimal, Untuk berbagi organisasi nasional terkait yang dimiliki oleh Indonesia, tetap banyak fasilitas yang masih terbatas dalam hal sarana dan prasarana. Hal yang sama berlaku untuk sinergi antara organisasi-organisasi ini, beberapa belum menyediakan kontribusi yang sesuai, seperti koordinator kelautan. Kapan bekerja sama dengan negara juga tidak mencapai hasil yang optimal, karena konsentrasi kerjasama cenderung terbatas atau karena kerjasama dibuat baru-baru ini dan bukan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Allifiansyah,S.(2015) *Media Alternative Di Indonesia. Jurnal scholar*,8
- Gusti Resi, Y., & Muslim, M. (2021). *Peranan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Pada Masyarakat Di Kabupaten Indragiri Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Bung Hatta).
- Hakiki, N., & Utomo, T. C. (2019). *Doktrin Poros Maritim Dunia Era Jokowi dan Keamanan di Bidang Maritim Studi Kasus: Perdagangan Narkotika Jalur Laut Tahun 2014-2018*. *Journal of International Relations*, 5(4), 609-617.
- Kurniawan, R. (2020). *Presiden Joko Widodo* (Studi Mahasiswa Uin Raden Intan Lampung).
- Notosusanto Nugroho (1971) *Norma-Norma Dasar Penelitian dan Penulisan Sejarah*. Jakarta: Departemen Pertahanan-Kelautan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI.
- Rantika Kurniati, H. Y., & Halim, A. *Police Role In The Socialization Of Hate Speech Prevention And Hoax News In The Resort's Legal Area Way Kanan*.
- Sanjaya, F. *Kepemimpinan Politik Nurdin Abdullah Di Kabupaten Bantaeng Skripsi Oleh: Ajib Subowo E*.

- Seprina, R. (2021). *Study Perkembangan Perekonomian Jambi Masa Hindia-Belanda (1906-1942) Sebagai Bahan Ajar Pembelajaran Sejarah Berbasis Lokal: Indonesia*. Jurnal EduSosial, 1(1), 99-109.
- Supardan, I. (2008). *Peranan Kepolisian Indonesia Dalam Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia* (Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).
- Wahyudi, A. T. (2016). *Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), 285-304.
- Yuningsih, A. S. (2019). *Peranan Komisaris Polisi M. Joesoef Martadilaga Dalam Perang Gerilya Pada Masa Agresi Militer Belanda Di Banten Tahun 1946-1949 M* (Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN).